



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 106
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada ayat (2) dan ayat (5) disebutkan bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1366/VI/TAHUN 2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Peyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 8);
18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 31).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/1494/Dinkes/VII/2022 Tanggal 6 Juli 2022 tentang Usulan Perubahan Rincian Anggaran pada DPA Dinas Kesehatan TA 2022;.

2. Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Nomor 1186/Disnaker/560/VI/2022 Tanggal 9 Juni 2022 tentang Permohonan Usulan Perubahan Rincian Anggaran TA 2022;
3. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660.5/3593/DLH/VI/2022 Tanggal 21 Juni 2022 tentang Usulan Perubahan antar Objek/Rincian Objek Pada DPA DLH;
4. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 660.1/3830/DLH/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022 tentang Usulan Perubahan antar Objek/Rincian Objek pada DPA DLH (Parsial);
5. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 903/411/DPMPSTSP/VI/2022 Tanggal 7 Juni 2022 tentang Perubahan Kode Rekening Belanja TA 2022;
6. Surat Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Nomor 524/6115/DPP/VII/2022 Tanggal 1 Juli 2022 tentang Permohonan Biaya Tak Terduga (BTT) Dalam Rangka Pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku di Kota Makassar;
7. Surat Kepala Dinas Sosial Nomor 910/0624/Dinsos/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022 tentang Usulan Perubahan antar Rekening Belanja pada DPA Dinas Sosial T.A 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 106 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 79 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, merubah Pendapatan dan Belanja Tidak Terduga pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dan merubah Belanja Operasi Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial dan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.

Pasal III

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 7 Juli 2022
WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 86

KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2022
PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD MESKURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OBJEK, KINCIAN OBJEK, SUB KINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode Rekening				Uraian	Belanja Perubahan	Semesta Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	0	0	0	0	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	4	1			PENDAPATAN DAERAH
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	4	1	2		Retribusi Daerah
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	4	1	4		Lain-lain PAD yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH					77.677.235.000,00	77.677.235.000,00			
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	6				BELANJA DAERAH
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	0							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	0							PROGRAM PERUBAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2							PROGRAM PEMBERUBAHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.01						Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	1					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	2					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	3					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	4					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	5					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	6					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	7					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	8					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Hipertensi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	9					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Diabetes Melitus
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	10					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	11					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	12					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terpapah HIV
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	13					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	14					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	15	1				BELANJA OPERASI
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	15	1	1			Belanja Pegawai
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	15	1	3			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	15	1	5	7		Belanja Honorarium
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	15	1	2			Belanja Barang dan Jasa
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	15	1	2	1		Belanja Barang
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	15	1	2	1	1	Belanja Barang Pakai Habis
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	15	1	2	2		Belanja Jasa
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	15	1	2	2	1	Belanja Jasa Kantor
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	15	1	2	4		Belanja Perjalanan Dinas
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	15	1	2	4	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	16	2				BELANJA MODAL
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	15	2	2			Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	15	2	2	7		Belanja Modal Alat Kesehatan dan Kesehatan
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	15	2	2	7	2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	16					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	17					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	18					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	19					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Acupuntur, Acupuntur Mandiri, dan Tradisional Lainnya
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	20					Pengelolaan Surveilans Kesehatan
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	22					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	25					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	26					Pengelolaan Jamuan Kesehatan Masyarakat
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	28					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium rujukan/Nasional
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	29					Penyediaan Rujukan Kabupaten/Kota Sehat
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	30					Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	31					Pengelolaan Penelitian Kesehatan
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	32					Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	33					Operasional Pelayanan Puskesmas
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	34					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	35					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	36					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktus Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Maksimal)
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	37					Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Rujukan Wabah
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	38					Penyediaan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.04						Penelitian Ilmu Kesehatan Bahak Kelas C dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	3							PROGRAM PERIKHTAPAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4							PROGRAM KEDIDIAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
JUMLAH BELANJA DAERAH					589.819.823.757,00	589.819.823.757,00			
SURPLUS/(DEFISIT)					-511.842.688.757,00	-511.842.688.757,00			
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	6				PEMBIAYAAN
					Jumlah Pembiayaan Pembayaran	0	0	0	
					Jumlah Pengeluaran Pembayaran	0	0	0	

KOTA MAKASSAR

PEJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode Rekening		Uraian							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	5				27.347.146.000,00	27.347.146.000,00	0	Tidak Berubah		
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1							27.347.146.000,00	27.347.146.000,00	0	Tidak Berubah		
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1							13.269.226.055,00	13.269.226.055,00	0	Tidak Berubah		
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	2							997.722.000,00	997.722.000,00	0	Tidak Berubah		
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	4							2.792.501.145,00	2.792.501.145,00	0	Tidak Berubah		
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5							4.497.976.000,00	4.497.976.000,00	0	Tidak Berubah		
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	6							5.440.310.400,00	5.440.310.400,00	0	Tidak Berubah		
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	6	2.01						5.344.500.000,00	5.344.500.000,00	0	Tidak Berubah		
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	1					5.238.605.000,00	5.238.605.000,00	0	Tidak Berubah		
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	2					36.125.000,00	36.125.000,00	0	Tidak Berubah		
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	2	5	1			36.125.000,00	36.125.000,00	0	Tidak Berubah		
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	2	5	1	2		36.125.000,00	36.125.000,00	0	Tidak Berubah		
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	2	5	1	2	1	18.125.000,00	18.125.000,00	0	Tidak Berubah		
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	2	5	1	2	1	18.125.000,00	18.125.000,00	0	Tidak Berubah		
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	2	5	1	2	4	18.000.000,00	18.000.000,00	0	Tidak Berubah	Perubahan Pada Rincian Objek	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	2	5	1	2	4	18.000.000,00	18.000.000,00	0	Tidak Berubah		
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	3					12.000.000,00	12.000.000,00	0	Tidak Berubah		
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	4					40.000.000,00	40.000.000,00	0	Tidak Berubah		
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	5					17.770.000,00	17.770.000,00	0	Tidak Berubah		
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	6	2.02						95.810.400,00	95.810.400,00	0	Tidak Berubah		
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	7							349.410.400,00	349.410.400,00	0	Tidak Berubah		
									JUMLAH BELANJA DAERAH	27.347.146.000,00	27.347.146.000,00	0	Tidak Berubah	
									SURPLUS/(DEFISIT)	-27.347.146.000,00	-27.347.146.000,00	0	Tidak Berubah	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	6					0	0	0		
									Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0		
									Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0		

KOTA MAHARANG
PERJABARAN PERUBAHAN APBD KEBURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELUPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
 Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Kode Rekening										Uraian	Saldo Perubahan	Saldo Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Perubahan	Keterangan
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	0	0	0	0	0	BELANJA DAERAH	20.003.780.000,00	20.003.780.000,00	0	0	Tidak Berubah
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	1								URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	20.003.780.000,00	20.003.780.000,00	0	0	Tidak Berubah
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	1								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.077.883.100,00	11.077.883.100,00	0	0	Tidak Berubah
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2								PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	440.773.000,00	440.773.000,00	0	0	Tidak Berubah
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2								PROGRAM PELAYANAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.773.340.180,00	2.773.340.180,00	0	0	Tidak Berubah
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2	2.01							Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Uji Kompetensi	2.178.607.050,00	2.178.607.050,00	0	0	Tidak Berubah
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	2	2.01	1						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pemasok Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	1.999.973.050,00	1.999.973.050,00	0	0	Tidak Berubah
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	3	2.01	1	8	1				BELANJA OPERASI	1.999.973.050,00	1.999.973.050,00	0	0	Tidak Berubah
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	3	2.01	1	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	1.999.973.050,00	1.999.973.050,00	0	0	Tidak Berubah
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	3	2.01	1	3	1	2	1		Belanja Barang	836.373.050,00	471.293.050,00	-365.080.000,00	0	Berkurang Sebesar Rp. 365.080.000,00
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	3	2.01	1	5	1	2	1	1	Belanja Barang Pukul Habis	836.373.050,00	471.293.050,00	-365.080.000,00	0	Berkurang Sebesar Rp. 365.080.000,00
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	3	2.01	1	3	1	2	2		Belanja Jasa	368.800.000,00	991.600.000,00	622.800.000,00	0	Bertambah Sebesar Rp. 622.800.000,00
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	3	2.01	1	5	1	2	2	1	Belanja Jasa Kantor	268.800.000,00	268.600.000,00	-100.200.000,00	0	Berkurang Sebesar Rp. 100.200.000,00
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	3	2.01	1	5	1	2	2	1	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	723.000.000,00	723.000.000,00	0	Bertambah Sebesar Rp. 723.000.000,00
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	3	2.01	1	3	1	2	4		Belanja Perjalanan Dinas	794.800.000,00	527.000.000,00	-267.720.000,00	0	Berkurang Sebesar Rp. 267.720.000,00
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	3	2.01	1	5	1	2	4	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	794.800.000,00	527.000.000,00	-267.720.000,00	0	Berkurang Sebesar Rp. 267.720.000,00
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	3	2.01	2						Konvensional Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Infrastruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	178.634.000,00	178.634.000,00	0	0	Tidak Berubah
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	3	2.02							Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	178.174.000,00	178.174.000,00	0	0	Tidak Berubah
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	3	2.03							Perbaikan dan Peralatan Lembaga Pelatihan Kerja	179.348.500,00	179.348.600,00	0	0	Tidak Berubah
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	3	2.04							Konvensional Produktivitas pada Perusahaan Kecil	741.902.000,00	741.502.000,00	0	0	Tidak Berubah
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	3	2.05							Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	600.810.500,00	600.810.500,00	0	0	Tidak Berubah
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	4								PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.414.889.550,00	3.414.889.550,00	0	0	Tidak Berubah
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	5								PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.296.895.200,00	1.296.895.200,00	0	0	Tidak Berubah
JUMLAH BELANJA DAERAH											20.003.780.000,00	20.003.780.000,00	0	0	Tidak Berubah
SURPLUS/(DEFISIT)											-20.003.780.000,00	-20.003.780.000,00	0	0	Tidak Berubah
2.07	2.07.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	0	0	0	0	0	PEMBIAYAAN	0	0	0	0	
Jumlah Penarikan Pembiayaan											0	0	0	0	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan											0	0	0	0	

KOTA MAKASSAR
PERJABARAN PEMBAYARAN APBD MENYUKAI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELUAS, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening		Uraian										Belanja Pembelian	Bendah Pembelian	Bertambah/ (Berkurang)	Pengaliran	Ketertarikan
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1										17.037.722.000,00	17.037.722.000,00	0	Tidak Berubah	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	1										13.277.504.400,00	13.277.504.400,00	0	Tidak Berubah	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2										142.194.000,00	142.194.000,00	0	Tidak Berubah	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	3										761.868.500,00	761.868.500,00	0	Tidak Berubah	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	4										1.022.220.600,00	1.022.220.600,00	0	Tidak Berubah	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5										1.389.992.100,00	1.389.992.100,00	0	Tidak Berubah	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	6										444.182.400,00	444.182.400,00	0	Tidak Berubah	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	6	2.01									444.182.400,00	444.182.400,00	0	Tidak Berubah	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	1								444.182.400,00	444.182.400,00	0	Tidak Berubah	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	1	6	1						439.182.400,00	439.182.400,00	0	Tidak Berubah	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	1	5	1	2					439.182.400,00	439.182.400,00	0	Tidak Berubah	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	1	5	1	2	1				13.292.000,00	13.292.000,00	0	Tidak Berubah	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	1	5	1	2	1	1			13.262.000,00	13.262.000,00	0	Tidak Berubah	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	1	5	1	2	2				425.920.400,00	425.920.400,00	0	Tidak Berubah	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	1	5	1	2	2	1			420.200.000,00	320.200.000,00	-100.000.000,00	100.000.000,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	1	5	1	2	2	2			5.720.400,00	5.720.400,00	0	Tidak Berubah	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	1	5	1	2	2	2			0	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	1	6	2						5.000.000,00	5.000.000,00	0	Tidak Berubah	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	1	5	2	5					5.000.000,00	5.000.000,00	0	Tidak Berubah	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	1	5	2	5	8				5.000.000,00	5.000.000,00	0	Tidak Berubah	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	6	2.01	1	5	2	5	8	1			5.000.000,00	5.000.000,00	0	Tidak Berubah	
JUMLAH BELANJA DAERAH												17.037.722.000,00	17.037.722.000,00	0	Tidak Berubah	
SURPLUS/(DEFISI)												-17.037.722.000,00	-17.037.722.000,00	0	Tidak Berubah	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	0	0.00	0	6							0	0	0	0	
PEMBIAYAAN												0	0	0	0	
Jumlah Pembiayaan Pembayaan												0	0	0	0	
Jumlah Pembayaran Pembiayaan												0	0	0	0	

KOTA KARASAK
PERJARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM/KELOMPOK, SUB KELOMPOK, KELUAS, JURUS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELAJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urutan Pemerintahan : 3.25 URUTAN PEMERINTAHAN BIDANG KEKAWATAN DAN PERIKANAN
 Organisasi : 3.25.3.27.0.00.02.0000 Dinas Perikanan dan Perikanan

Kode Rekening		Urutan						Beban Perubahan	Musnah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Penjelasan	Keterangan
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	0	0.00	0	4			1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0	Tidak Berubah	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	0	0.00	0	4	1		1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0	Tidak Berubah	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	0	0.00	0	4	1	2	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0	Tidak Berubah	
							PENDAPATAN DAERAH					
							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
							Retribusi Daerah					
							JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0	Tidak Berubah	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	0						26.324.623.740,00	26.324.623.740,00	0	Tidak Berubah	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	1						23.311.806.876,00	23.311.806.876,00	0	Tidak Berubah	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	3						2.308.096.690,00	2.308.096.690,00	0	Tidak Berubah	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	5						1.514.627.200,00	1.514.627.200,00	0	Tidak Berubah	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	8						27.447.000,00	27.447.000,00	0	Tidak Berubah	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	8						244.514.876,00	244.514.876,00	0	Tidak Berubah	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	3						19.786.028.260,00	19.786.028.260,00	1.188.917.000,00	Bertambah sebesar Rp. 1.188.917.000,00	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	3						6.933.604.222,00	6.933.604.222,00	0	Tidak Berubah	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	3						178.480.000,00	178.480.000,00	0	Tidak Berubah	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	3						12.978.990.038,00	14.168.609.018,00	1.188.917.000,00	Bertambah sebesar Rp. 1.188.917.000,00	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	4	2.01					118.834.500,00	1.304.782.600,00	1.188.917.000,00	Bertambah sebesar Rp. 1.188.917.000,00	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	4	2.01	1				118.834.500,00	1.304.782.600,00	1.188.917.000,00	Bertambah sebesar Rp. 1.188.917.000,00	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	4	2.01	1	5	1	2	118.834.500,00	1.304.782.600,00	1.188.917.000,00	Bertambah sebesar Rp. 1.188.917.000,00	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	4	2.01	1	5	1	2	50.635.500,00	370.432.500,00	478.517.000,00	Bertambah sebesar Rp. 478.517.000,00	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	4	2.01	1	5	1	2	50.635.500,00	370.432.500,00	478.517.000,00	Bertambah sebesar Rp. 478.517.000,00	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	4	2.01	1	5	1	2	20.200.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	Bertambah sebesar Rp. 63.000.000,00	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	4	2.01	1	5	1	2	30.200.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	Bertambah sebesar Rp. 63.000.000,00	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	4	2.01	1	5	1	2	44.700.000,00	647.400.000,00	647.400.000,00	Bertambah sebesar Rp. 647.400.000,00	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	4	2.01	1	5	1	2	44.700.000,00	647.400.000,00	647.400.000,00	Bertambah sebesar Rp. 647.400.000,00	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	4	2.01	1	5	1	2	0	0	0	Tidak Berubah	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	4	2.02					12.240.790.833,00	12.240.790.833,00	0	Tidak Berubah	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	4	2.03					229.614.885,00	229.614.885,00	0	Tidak Berubah	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	4	2.04					260.747.400,00	260.747.400,00	0	Tidak Berubah	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	6						7.883.000,00	7.883.000,00	0	Tidak Berubah	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	7						692.871.000,00	692.871.000,00	0	Tidak Berubah	
							JUMLAH BELAJA DAERAH	46.111.423.000,00	47.370.589.000,00	1.188.917.000,00	Bertambah sebesar Rp. 1.188.917.000,00	
							SUBSIDSI/DEBITUM	-44.811.462.000,00	-46.000.869.000,00	-1.188.917.000,00	Berkurang sebesar Rp. 1.188.917.000,00	
3.25	3.25.3.27.0.00.02.0000	0	0.00	0	4			0	0	0		
							PEMBAYARAN					
							Jumlah Pembiayaan Pembiayaan	0	0	0		
							Jumlah Pembiayaan Pembiayaan	0	0	0		

KOTA MAKASSAR																
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN																
TAHUN ANGGARAN 2022																
Urusan Pemerintahan		: 5.02 KEUANGAN														
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah														
Kode Rekening		Uraian									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	0	0.00	0	4						PENDAPATAN DAERAH	2.363.418.858.000,00	2.363.593.858.000,00	175.000.000,00	Bertambah Sebesar Rp. 175.000.000,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	0	0.00	0	4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	127.617.216.000,00	127.617.216.000,00	0	Tidak Berubah	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	0	0.00	0	4	2					PENDAPATAN TRANSFER	2.210.606.570.000,00	2.210.781.570.000,00	175.000.000,00	Bertambah Sebesar Rp. 175.000.000,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	0	0.00	0	4	2	1				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.854.150.570.000,00	1.854.150.570.000,00	0	Tidak Berubah	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	0	0.00	0	4	2	2				Pendapatan Transfer Antar Daerah	356.456.000.000,00	356.631.000.000,00	175.000.000,00	Bertambah Sebesar Rp. 175.000.000,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	0	0.00	0	4	2	2	1			Pendapatan Bagi Hasil	324.200.000.000,00	324.200.000.000,00	0	Tidak Berubah	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	0	0.00	0	4	2	2	2			Bantuan Keuangan	32.256.000.000,00	32.431.000.000,00	175.000.000,00	Bertambah Sebesar Rp. 175.000.000,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	0	0.00	0	4	2	2	2	2		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	32.256.000.000,00	32.431.000.000,00	175.000.000,00	Bertambah Sebesar Rp. 175.000.000,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	0	0.00	0	4	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.195.072.000,00	25.195.072.000,00	0	Tidak Berubah	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH											2.363.418.858.000,00	2.363.593.858.000,00	175.000.000,00	Bertambah Sebesar Rp. 175.000.000,00		
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	0	0.00	0	5						BELANJA DAERAH	104.277.817.703,00	101.427.340.703,00	-2.850.477.000,00	Berkurang Sebesar Rp. 2.850.477.000,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	0									KEUANGAN	104.277.817.703,00	101.427.340.703,00	-2.850.477.000,00	Berkurang Sebesar Rp. 2.850.477.000,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	1									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.445.466.483,00	23.445.466.483,00	0	Tidak Berubah	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	2									PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	76.531.749.420,00	73.681.272.420,00	-2.850.477.000,00	Berkurang Sebesar Rp. 2.850.477.000,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	2	2.01								Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	10.673.576.000,00	10.673.576.000,00	0	Tidak Berubah	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	2	2.02								Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.783.959.400,00	2.783.959.400,00	0	Tidak Berubah	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	2	2.03								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.437.995.200,00	2.437.995.200,00	0	Tidak Berubah	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	2	2.04								Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	57.437.356.820,00	54.586.879.820,00	-2.850.477.000,00	Berkurang Sebesar Rp. 2.850.477.000,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	2	2.04	4							Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah	82.624.000,00	82.624.000,00	0	Tidak Berubah	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	2	2.04	9							Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	57.354.732.820,00	54.504.255.820,00	-2.850.477.000,00	Berkurang Sebesar Rp. 2.850.477.000,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	2	2.04	9	5	3					BELANJA TIDAK TERDUGA	57.354.732.820,00	54.504.255.820,00	-2.850.477.000,00	Berkurang Sebesar Rp. 2.850.477.000,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	2	2.04	9	5	3	1				Belanja Tidak Terduga	57.354.732.820,00	54.504.255.820,00	-2.850.477.000,00	Berkurang Sebesar Rp. 2.850.477.000,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	2	2.04	9	5	3	1	1			Belanja Tidak Terduga	57.354.732.820,00	54.504.255.820,00	-2.850.477.000,00	Berkurang Sebesar Rp. 2.850.477.000,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	2	2.05								Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	3.198.862.000,00	3.198.862.000,00	0	Tidak Berubah	
5.02	5.02.0.00.0.00.02.0000	3									PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.300.601.800,00	4.300.601.800,00	0	Tidak Berubah	
JUMLAH BELANJA DAERAH											104.277.817.703,00	101.427.340.703,00	-2.850.477.000,00	Berkurang Sebesar Rp. 2.850.477.000,00		
SURPLUS/(DEFISIT)											2.259.141.040.297,00	2.262.166.517.297,00	3.025.477.000,00	Bertambah Sebesar Rp. 3.025.477.000,00		
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN											766.284.249.263,00	766.284.249.263,00	0	Tidak Berubah		
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN											7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0	Tidak Berubah		

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO